

# Factors Affecting the Implementation of Good Government Governance (GGG) and Its Implications for Performance Accountability

Nur Sandi Marsuni, Ismail Rasulong, Faidul Adziem  
Megister Akuntansi, Universitas Hasanuddin<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar<sup>23</sup>  
[nursandimarsuni@unhas.ac.id](mailto:nursandimarsuni@unhas.ac.id)

## Keywords:

Good Government Governance (GGG), Competence of Local Government Apparatus, Professionalism of Government Apparatus, Performance Accountability of Local Government Agencies

## Abstract

*This study aims to examine several critical issues, such as the influence of local government competence and professionalism of government internal control apparatus on the implementation of Good Government Governance (GGG), as well as the impact of Good Government Governance (GGG) on local government performance. The research method used is Literature Review Analysis. This study uses fifteen references, two Scopus articles, ten national articles, and three books on local government organizations in Indonesia. Our findings show that the implementation of GGG is influenced by the competence and professionalism of local government officials as well as government internal supervision, and the implementation of Good Government Governance (GGG) affects the accountability performance of local governments.*

## Kata Kunci

Good Government Governance (GGG), Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Profesionalisme Aparatur Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

## Abstrak

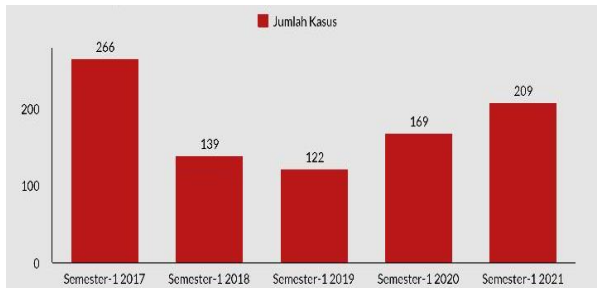
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa isu kritis, seperti pengaruh kompetensi pemerintah daerah dan profesionalisme aparatur pengendalian intern pemerintah terhadap penerapan Good Government Governance (GGG), serta dampak Good Government Governance (GGG) terhadap kinerja pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu Analisis Literatur Review. Penelitian ini menggunakan lima belas referensi, dua artikel Scopus, sepuluh artikel nasional, dan tiga buku tentang organisasi pemerintah daerah di Indonesia. Temuan kami menunjukkan bahwa implementasi GGG dipengaruhi oleh kompetensi dan Profesionalisme aparatur pemerintah daerah serta pengawasan intern pemerintah, dan implementasi Good Government Governance (GGG) berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas pemerintah daerah.

## 1. PENDAHULUAN

Dibutuhkan waktu yang lama untuk membangun pemerintahan yang kuat. Untuk meningkatkan solidaritas dan mewujudkan pemerintahan yang efektif, juga menuntut dedikasi dan harapan yang luar biasa dari seluruh komponen bangsa, yang melibatkan tiga pilar bangsa, yaitu aparatur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Namun, mencapai tata kelola yang baik adalah tugas yang sulit. Kendala terbesar adalah isu korupsi, kolusi, dan nepotisme pemerintah, yang terlihat dalam etika perusahaan dan layanan publik jangka panjang. Lebih lanjut, Lembaga

swadaya masyarakat anti-korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus.

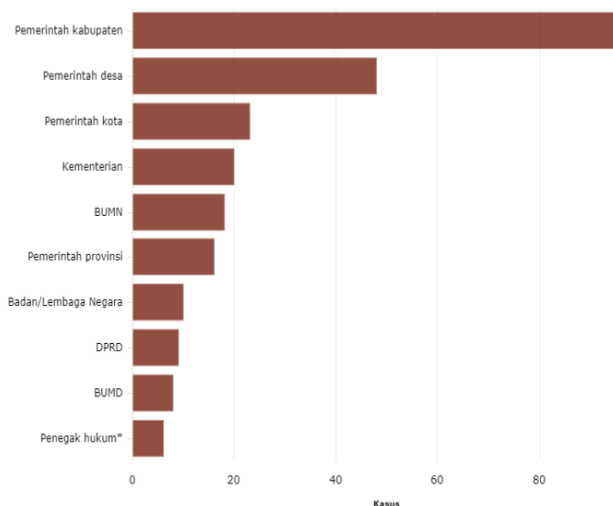
## Grafik Tindak Korupsi di Indonesia Tahun 2021



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW) 2021

Nilai kerugian negara akibat korupsi, menurut ICW, juga bertambah. Nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp. 18,173 triliun pada semester satu tahun 2020, dan Rp. 26,83 triliun pada semester satu tahun 2021. Dengan kata lain, nilai kerugian negara akibat korupsi meningkat 47,6 persen. Nilai kerugian negara secara konsisten meningkat selama empat tahun terakhir, namun jumlah penuntutan kasus korupsi bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah serius di Indonesia. Menurut laporan Transparency International tahun 2021 di Indonesia, ada sepuluh lembaga dengan kasus korupsi terbanyak ditunjukkan melalui statistik dibawah ini.

## Kasus Korupsi Di Lembaga Pemerintah Tahun 2021



Sumber: Transparency Internasional 2021

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa yang banyak melakukan korupsi di Indonesia adalah instansi pemerintahan daerah kemudian disusul oleh pemerintahan desa.

Kasus korupsi umumnya banyak terjadi di pemerintahan desa khususnya penggelapan Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur Desa, berikut kami tampilkan grafik kasus korupsi Dana Desa lima tahun terakhir (2015-2021):

## Grafik Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW) 2021

Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020 Pada tahun 2020, kampanye antikorupsi Indonesia mengalami kekalahan telak. Hampir semua cabang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun penegak hukum, gagal membantu industri korupsi. Arah politik hukum semakin kabur; alih-alih diarahkan pada kepentingan komunitas, itu digunakan untuk memperkuat minoritas kecil oligarki. Hal ini yang melatarbelakangi pentingnya Penerapan Good Government Governance (GGG) Apalagi, studi tersebut menunjukkan bahwa masalah korupsi erat kaitannya dengan birokrasi dan itu menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia adalah yang terburuk (Leny Nofianti 2014). Buruknya perilaku birokrasi tersebut merupakan hasil dari akuntabilitas yang tidak dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, penerapan good governance perlu ditingkatkan. Terkait dengan praktik korupsi di pemerintahan daerah di Indonesia, Transparency International Indonesia (TII) melakukan survei pada tahun 2010 untuk menyelidiki masalah di sektor publik.

Dalam kaitannya dengan pembenahan penyelenggaraan pemerintahan, reformasi yang berlangsung cukup lama sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap administrasi publik, yaitu adanya upaya mengembalikan fungsi aparatur pemerintah dalam

memberikan pelayanan publik. Masalah utama yang perlu ditangani pemerintah adalah rendahnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas. Fenomena tersebut telah menjadi isu utama dalam menjalankan pemerintahan daerah di Indonesia (Enceng, dkk., 2008 dalam Leny Nofianti dkk 2014).

Aparatur pengendalian intern pemerintah berkewajiban untuk melakukan penelaah atas laporan keuangan sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, penelaahan tersebut belum sepenuhnya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini terlihat dari masih tingginya laporan keuangan pemerintah tidak hanya di tingkat kementerian tetapi juga di daerah yang mendapat opini disclaimer dari BPK (Wahyudi, 2010 dalam Leny Nofianti dkk 2014).

Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) bertugas memastikan tercapainya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan tujuan pembangunan nasional (Cheng, 2010 dalam Leny Nofianti dkk. 2014).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Good Government Governance (GGG)*

Tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks pemerintahan diistilahkan dengan Good Government Governance (GGG), menurut Segara dalam Fransisca Harpranisa Cahyani Ronanda (2020). Tata kelola pemerintahan yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada seluruh penyelenggaraan pemerintahan agar pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Menurut aturan Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (2008), ada lima elemen yang diterapkan dalam membangun Tata Pemerintahan yang Baik: demokrasi, keterbukaan, akuntabilitas, budaya legislasi, serta keadilan dan kesetaraan.

Tata kelola yang baik sering disamakan dengan kepemimpinan yang baik. Keadilan,

keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab, menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), adalah persyaratan untuk tata kelola yang efektif (Agoes, 2004). Sesuai dengan tiga kriteria BPK (2004), studi ini mencakup tiga pilar dasar pemerintahan yang baik: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Leung dan Schrank (2007) melakukan penelitian tentang Pertumbuhan dan Tata Kelola: Model, Tindakan, dan Mekanisme. Kajian ini menghubungkan good governance, kualitas aparatur pemerintah, dan pembangunan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan dominasi yang dilakukan oleh pemerintah bermasalah mengakibatkan bias persepsi; kebingungan dalam memutuskan kebijakan ekonomi.

Sarilena (2004) melakukan penelitian di Indonesia untuk mengetahui good governance, khususnya pada Badan Pemeriksa Keuangan di Jawa Barat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa profesionalisme BPK yang meliputi kompetensi, independensi, kehati-hatian profesional, dan kerahasiaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan good governance di Jawa Barat, baik secara simultan maupun parsial.

### 2.2 *Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah*

Boutler dkk. (1999) menyatakan kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang untuk menjadi mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam bidang pekerjaan, peran atau situasi. Menurut Cheng dkk. (2002), kompetensi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan (pendidikan, keterampilan dan pengalaman) dan perilaku etis dalam bekerja. kompetensi mencakup empat komponen: keahlian fungsional, perspektif sektor luas, kualitas kepemimpinan, dan atribut pribadi. Hal ini sesuai dengan Nur Afiah (2004), komponen kompetensi meliputi: pengetahuan, pengalaman, kualitas kepemimpinan etis berupa etika dan keterampilan subjektif dan objektif. Pengetahuan yang didapat mulai dari

pendidikan, keterampilan, dan pelatihan. Dari definisi dan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa peran pendidikan, pelatihan, keterampilan, pengembangan kualitas kepemimpinan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah perlu dilakukan diupayakan dalam rangka mendukung kinerja aparatur pemerintah daerah yang seimbang antara profesionalisme dan moralitas.

Kompetensi yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan etika dalam bekerja (Cheng et al., 2002). Selain itu, Nur Afiah (2004) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji hubungan antara kompetensi aparatur pemerintah daerah dengan good governance. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kompetensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kompetensi aparatur pemerintah daerah, pelaksanaan sistem informasi akuntansi, penganggaran, dan kualitas informasi keuangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap prinsip-prinsip good governance.

Leung dkk. (2009) mempelajari peran audit internal dalam tata kelola dan manajemen perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk meningkatkan peran audit internal dalam tata kelola perusahaan, perusahaan harus fokus pada kompetensi auditor internal dalam memberikan jaminan kepada manajemen dan komite integritas dalam bentuk informasi.

## 2.2 Profesionalisme Aparatur Pemerintah

Kalbers & Fogarty (1995) menggunakan dimensi profesionalisme yang dikemukakan oleh Hall yang selanjutnya didefinisikan sebagai berikut:

1. sebuah. Dedikasi terhadap profesi, tercermin melalui dedikasi profesional yang diwujudkan dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan. Kewajiban sosial, terkait dengan persepsi tentang pentingnya peran profesional dan manfaat sosial dan profesional yang ditawarkan oleh profesi.
2. Tuntutan otonomi, terkait dengan pandangan bahwa seorang profesional

harus mampu mengambil keputusan tanpa tekanan dari pihak manapun.

3. Keyakinan dalam pengaturan diri, terkait dengan keyakinan bahwa rekan kerja memiliki wewenang dalam mengevaluasi pekerjaan profesional.
4. Afiliasi komunitas, terkait dengan pentingnya asosiasi profesi termasuk organisasi formal dan kelompok rekan kerja informal sebagai sumber ide untuk bekerja.

Kalbers dan Fogarty (1995) melakukan penelitian yang berkaitan dengan profesionalisme auditor internal dan kinerja. Hasil penelitian membuktikan bahwa hanya dua dimensi profesionalisme auditor internal yang berkorelasi positif dengan kinerja, yaitu community affiliation dan otonomi tuntutan.

## 2.3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Cooper dan Ijiri (1984:7) mendefinisikan akuntabilitas sebagai:

1. Kewajiban seorang karyawan, agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan, sering kali secara berkala, tentang tindakan atau kegagalan untuk bertindak mengikuti wewenang yang didelegasikan. Oleh karena itu (akuntansi pemerintah) penunjukan rekening atau jumlah kewajiban petugas pengeluaran.
2. Ukuran tanggung jawab atau kewajiban kepada orang lain, dinyatakan dalam uang, unit properti, atau dasar lain yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Kewajiban untuk membuktikan pengelolaan yang baik, pengendalian atau kinerja lain yang ditetapkan oleh undang-undang, peraturan, kesepakatan atau kebiasaan.

Hubungan antara kompetensi aparatur dengan akuntabilitas kinerja. Studi ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dan administrasi telah mengalami krisis di bawah globalisasi, oleh karena itu, kompetensi dan etika profesional diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur. Hasil penelitian menunjukkan peran auditor

internal, persepsi kepala daerah, dan penerapan sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian dan kerangka kerja sebelumnya, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparatur pengawasan intern pemerintah berpengaruh terhadap pelaksanaan GGG
2. Kompetensi aparatur pemerintah daerah, profesionalisme aparatur pengendalian intern pemerintah dan penerapan GGG berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

### 3. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis dari hasil penelitian yang dilakukan para peneliti sebelumnya yang terkait dengan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Good Government Governance (GGG) dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur review. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Literatur review bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan.

Tujuan yang lebih rinci dijelaskan oleh Okoli & Schabram (2010) yaitu (1) menyediakan latar/basis teori untuk penelitian yang akan dilakukan, (2) mempelajari kedalaman atau keluasan penelitian yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti dan (3) menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh penelitian terdahulu.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah daerah terhadap Penerapan Good Government Governance

Hood dan Lodge (2004) menyelidiki kompetensi nasional dan tata kelola pejabat publik puncak di tiga negara berbeda untuk artikel mereka berjudul "Kompetensi, Birokrasi, dan Reformasi Manajemen Publik: Analisis Komparatif" (Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman). Perkembangan reformasi kompetensi menunjukkan adanya konsep-konsep tertentu dalam manajemen pelayanan publik dan pelayanan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Mengingat kompetensi merupakan hal yang vital dalam reformasi pelayanan publik, maka pemeriksaan ini perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Leny Nofianti dkk tahun (2014) Kompetensi aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparatur dan pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara simultan dan signifikan sebesar 38,8 persen terhadap penerapan GGG. Di antara kedua variabel eksogen tersebut, profesionalisme aparatur pengendalian intern pemerintah paling berpengaruh terhadap penerapan GGG, dengan bobot 22,4%. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berkontribusi langsung sebesar 15,5% terhadap pelaksanaan GGG. Profesionalisme dalam sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh tidak langsung sebesar 0,9 persen.

Selain itu, kompetensi aparatur pemda secara serentak memberikan kontribusi 16,4 persen terhadap peningkatan implementasi GGG. Hasil ini menguatkan temuan Cornforth et al. (1998) dan Nur Afiah (2004) yang menegaskan bahwa kompetensi perangkat pemerintah daerah berpengaruh terhadap implementasi GGG. Apalagi profesionalisme aparatur pengendalian intern



pemerintah berpengaruh langsung sebesar 21,5 persen terhadap pelaksanaan GGG.

Secara tidak langsung, kompetensi aparat pemerintah daerah juga berpengaruh terhadap pelaksanaan GGG sebesar 0,9%. Profesionalisme aparat pengawasan internal pemerintah secara simultan berkontribusi 22,4% terhadap peningkatan implementasi GGG. Temuan ini melengkapi temuan Leung et al. (2009) dan Sarilena (2004) yang menyimpulkan bahwa profesionalisme aparat pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap penerapan GGG.

Nur Afiah (2004) meneliti bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang baik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat keahlian yang dimiliki oleh anggota DPRD, tingkat keahlian yang dimiliki oleh aparat pemerintah daerah, penerapan sistem informasi akuntansi, penganggaran, dan kualitas informasi keuangan. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa tingkat keahlian yang dimiliki anggota DPRD, tingkat keahlian yang dimiliki aparat pemerintah daerah, penerapan sistem informasi akuntansi, proses penganggaran, dan kualitas informasi keuangan semuanya berpengaruh, baik secara serentak atau sebagian, atas dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik.

#### **4.2 Pengaruh Profesionalisme Pengawas Intern terhadap Penerapan Good Government Governance**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Leny Nofianti dkk tahun (2014) Kompetensi aparat pemerintah daerah, profesionalisme aparat pengendalian intern pemerintah, dan penerapan GGG secara simultan berpengaruh 58,1% terhadap akuntabilitas kinerja. Di antara ketiga variabel eksogen, penerapan GGG paling besar pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja, dengan kontribusi sebesar 26%.

Selanjutnya, kompetensi aparat pemerintah daerah secara langsung menambah

6,1% akuntabilitas kinerja. Selain itu, profesionalisme aparat pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan GGG berpengaruh tidak langsung sebesar 4,4% terhadap akuntabilitas kinerja. Selain itu, kecakapan pegawai pemerintah daerah secara bersamaan memberikan kontribusi 10,5% terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja. Temuan ini mengkonfirmasi pernyataan Ali (2002) bahwa kompetensi pejabat pemerintah daerah mempengaruhi akuntabilitas kinerja.

Apalagi profesionalisme aparat pengendalian intern pemerintah berdampak langsung sebesar 14,5 persen terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Selain itu, kompetensi aparat pemerintah daerah dan pelaksanaan GGG memiliki pengaruh tidak langsung sebesar 7,1% terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Secara bersamaan, profesionalisme sistem pengendalian intern pemerintah berkontribusi sebesar 21,6% terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sadeli (2005), tingkat profesionalisme aparat pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Berikut kesimpulan yang dapat dibentuk berdasarkan temuan dan pembahasan:

1. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparat pemerintah daerah dan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah berpengaruh baik terhadap implementasi GGG.
2. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparat pemerintah daerah, profesionalisme aparat pengawas internal pemerintah, dan pemanfaatan GGG semuanya berdampak menguntungkan terhadap akuntabilitas kinerja.

### **5.2 Keterbatasan penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa kekurangan dari penelitian ini kurangnya referensi terbaru sehingga penelitian ini.

### 5.3 Saran untuk akademisi

Perlu adanya penelitian tambahan tentang good governance dari berbagai aspek, antara lain keahlian aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparatur pengawasan intern pemerintah. Aspek-aspek tersebut antara lain sistem akuntansi pemerintah, keahlian auditor eksternal pemerintah, regulasi, dan sebagainya. Ke atas. Selain itu, temuan penelitian ini berpotensi memberikan saran langsung kepada pemerintah daerah di Indonesia dalam rangka peningkatan tata kelola.

### 5.4 Saran untuk Aparatur Pemerintah Daerah

Untuk menjalankan praktik yang lebih baik dalam audit sektor publik, beberapa langkah dapat diambil:

1. Kepala unit kerja perlu menyadari pentingnya pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan di bidang teknis akuntansi sektor publik. Dengan demikian, mereka mampu mencapai kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhannya, mengingat unit kerja yang diamati secara keseluruhan menunjukkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang rendah.
2. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, aparatur pemerintah daerah dituntut untuk lebih peka terhadap permasalahan masyarakat, peningkatan kinerja aparatur itu sendiri melalui pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi serta penetapan standar etika dan perilaku aparatur itu sendiri. Penerapan etika pada aparatur pemerintah daerah akan meningkatkan tingkat kejujuran, rasionalitas, keberanian, rasa tanggung jawab hingga kualitas keputusan/kebijakan terhadap kehidupan orang lain.

### Daftar Pustaka

- Agoes, S. (2004). *Auditing (pemeriksaan akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi kedua, Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Boutler, Nick., Murray, D., & Jackie, H. (1999). *People and Competency, the Route to Competitive Advantage*. Crest Publishing House. New Delhi.
- Harpranisa Cooper, W., & Ijiri, Y. (1984). *Kohler Dictionary of Accountant*, (6th ed.). New Delhi: Prentice hall of India.
- Enceng, Liestyodono, B.I & Purwaningdyah, M.W. (2008). **Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance**, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Volume 2 No.1 Juni 2008, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN, Jakarta.
- Hood, C. & Lodge, M. (2004). **Competency, Bureaucracy, and Public Management Reform: A Comparative Analysis**, *Governance*. <http://gateway.brint.com>.
- Kalbers, L. P., & Fogarty, T. J. (1995). **Professionalism and Its Consequences: A Study of Internal Auditors**. *A Journal of Practice and Theory*. Spring. Vol. 14. No.1. pp. 64-85 <http://gateway.proquest.com>.
- Leung, P. (2009). **The Role of Internal Audit in Corporate Governance and Management**. *The Institute of Internal Auditors Inc. Research Foundation*, <http://gateway.brint.com>.
- Nur Afiah, N (2004). **Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, serta Kualitas Informasi Keuangan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik**. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- Okoli, Chitu (2015), *A Guide to Conducting a Standalone Systematic Literature Review*. *Communications of the Association for Information Systems* (37:43), November 2015, pp. 879-910
- Sarilena, D. (2004). **Pengaruh Profesionalitas Aparat Badan Pengawasan Daerah Terhadap Pelaksanaan Good Governance**. Bandung, Disertasi. Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran.



- Wahyudi. (2010). **Pemberdayaan Peran Audit Internal dalam Mewujudkan Good Governance pada Sektor Publik**, [www://pusdiklatwas.bpkp.go.id](http://pusdiklatwas.bpkp.go.id).
- Fransisca Harpranisa Cahyani Ronanda (2020) **JURNAL AKUNTANSI DAN GOVERNANCE ANDALAS**. Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas 3(1): 50-68. Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- Okoli, C. and Schabram, K., 2011. **A Guide to Conducting Literature Review of Information System Research**, Communications of the Association for Information System, 37 (43), 879-910.
- Hood, Cristopher and Lodge, martin (2004). **“Competency, Bureaucracy, and Public Management Reform: A Comparative Analysis”** Governance. <http://gateway.brint.com>
- Nur Afiah, Nunuy 2004. **Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, serta Kualitas Informasi Keuangan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik**. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
- Leny Nofianti, Novie Susanti Suseno 2014. **Factors affecting implementation of good government governance (GGG) and their implications towards performance accountability**. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164 ( 2014 ) 98 - 105. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri, Suska Riau, Indonesia b Fakultas Ekonomi, Universitas Garut, Indonesia
- Leung, P. (2009). **The Role of Internal Audit in Corporate Governance and Management**. *The Institute of Internal Auditors Inc*. Research Foundation, <http://gateway.brint.com>
- Diakses pada 25 Mei 2022, dari <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>
- Indonesia Corruption Watch (2020, 30 Desember). **Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran Demokrasi, dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi**. Diakses pada 25 Mei 2022, dari <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>
- Transparency International (2021). **CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX**. Diakses pada 25 Mei 2022, dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>

**Website:**

- Indonesia Corruption Watch (ICW) (2021, 14 September). **Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya**.